

**STATUS NAFKAH, *MASKAN*, DAN *KISWAH*  
BAGI ISTRI YANG DITALAK *BĀ'IN SUGRA***



Oleh:

**ZAKYYAH, S. HI**  
**NIM: 1520310030**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakyyah, S.HI  
NIM : 1520310030  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 April 2017

a yang menyatakan,



Zakyyah, S.HI  
NIM: 1520310030

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakyyah, S.HI  
NIM : 1520310030  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 20 April 2017  
Saya yang menyatakan,

  
Zakyyah, S.HI  
NIM: 1520310030

## PENGESAHAN PRODI

Tesis Berjudul : Status Nafkah, Maskan, dan Kisswah Bagi Istri yang Ditalak Ba'in Sugra.

Nama : Zakyyah, S. HI.  
NIM : 1520310030  
Program studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 18 Mei 2017

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Mei 2017  
a.n Dekan,  
Ka. Prodi Hukum Islam,

  
**Dr. Ahmad Bahiej, M. Hum**  
NIP: 19750615 200003 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-179/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "STATUS NAFKAH, MASKAN DAN KISWAH BAGI ISTRI YANG DITALAK BATN SUGRA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAKYYAH, S.HI  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310030  
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 18 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul:

### **STATUS NAFKAH, *MASKAN*, DAN *KISWAH* BAGI ISTRI YANG DITALAK *BĀ'IN SUGRA***

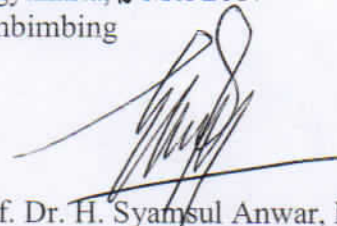
Yang ditulis oleh:

Nama : Zakyyah, S.HI  
NIM : 1520310030  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2017  
Pembimbing



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A  
NIP. 19560517 198303 1 003



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul:

### **STATUS NAFKAH, *MASKAN*, DAN *KISWAH* BAGI ISTRI YANG DITALAK *BĀ'IN SUGRA***

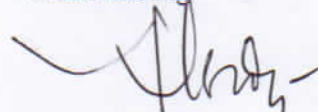
Yang ditulis oleh:

Nama : Zakyyah, S.HI  
NIM : 1520310030  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2017  
Pembimbing



Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

## MOTTO

رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

*Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan  
Engkau adalah Sebaik-baik yang memberi tempat.*



## ABSTRAK

KHI dan ulama mazhab (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) membagi talak menjadi tiga yaitu talak *raj'i*, talak *b 'in sugra* dan talak *b 'in kubra*. Namun berbicara akibat hukum terkait nafkah maskan, dan *kiswah* dari talak dibedakan antara talak *raj'i* dan talak *b 'in*, padahal ketiga talak tersebut sama-sama bentuk dari putusnya perkawinan. Talak *raj'i*, *b 'in sugra* dan *b 'in kubra* merupakan tiga perbuatan hukum yang sama, oleh sebab itu akibat hukum yang ditimbulkan khususnya nafkah, *maskan* dan *kiswah* juga harus disamakan. Talak yang pada dasarnya merupakan solusi untuk menghilangkan kemudharatan dalam perkawinan, maka akibat hukum yang ditimbulkan juga harus menghilangkan kemudharatan bukan malah menimbulkan kemudharatan yang baru.

Berdasarkan latar belakang tersebut tersimpul dua rumusan masalah penelitian. *Pertama*, mengapa KHI dan ulama empat mazhab tidak membedakan akibat hukum dari talak *b 'in sugra* dan talak *b 'in kubra*? dan *kedua*, bagaimana analisis teori pertingkatan norma terkait status nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra*? Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan memanfaatkan pendekatan normatif dan memilih teori pertingkatan norma dalam hukum Islam untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini ada dua, *pertama*, Pasal 149 huruf b KHI menentukan bahwa istri yang ditalak *b 'in sugra* tidak berhak mendapatkan nafkah, *maskan*, dan *kiswah*, namun pada Pasal 152 KHI menentukan bahwa istri yang ditalak *b 'in sugra* berhak atas nafkah saja dengan syarat tidak *nusy z*. Sedangkan pendapat empat mazhab terbagi menjadi tiga ketentuan: ketentuan pertama istri yang ditalak *b 'in sugra* berhak atas nafkah, *maskan*, dan *kiswah* dengan syarat tidak *nusy z*, ini merupakan pendapat mazhab Hanafi. Ketentuan kedua adalah istri yang ditalak *b 'in sugra* hanya berhak atas *maskan* dengan syarat tidak *nusy z*, ini merupakan pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Terakhir ketentuan ketiga merupakan pendapat mazhab Hambali yang menentukan bahwa istri yang ditalak *b 'in sugra* tidak memiliki hak atas nafkah, *maskan*, dan *kiswah*. *Kedua*, Istri yang ditalak *b 'in sugra* berhak mendapatkan nafkah, *maskan*, *kiswah* selama *'iddah* sesuai kemampuan ekonomi suami dengan syarat tidak *nusy z*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	a'		es (dengan titi di atas)
ج	Jim	j	je
ح	a'		ha (dengan titi di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	al		zet (dengan titi di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titi di bawah)
ض	ad		de (dengan titi di bawah)
ط	a'		te (dengan titi di bawah)
ظ	a'		zet (dengan titi di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين ditulis muta'qqidin

’iddah ditulis ‘iddah

## C. Ta’marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

حزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,  
maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء ditulis kar mah al-auly ‘

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر     ditulis     zak tul fitri

#### D. Vokal Pendek

fathah     ditulis     a

kasrah     ditulis     i

—<sup>◌</sup> dammah     ditulis     u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif     ditulis

جاهلية     ditulis     j hiliyyah

Fathah + ya' mati     ditulis

يسعى     ditulis     yas'

Kasrah + ya' mati     ditulis

كريم     ditulis     kar m

Dammah + wawu mati     ditulis

فروض     ditulis     fur d

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati     ditulis     ai

بينكم     ditulis     bainakum

Fathah + wawu mati     ditulis     au

قول     ditulis     qaulun

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	Al-Qur' n
القياس	ditulis	al-Qiy s

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Sam '
الشمس	ditulis	asy-Syams

	ditulis	aw al-fur d
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan karunia tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi serta suri tauladan, pencerah dan semangat bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Status Nafkah, Maskan, dan Kiswa Bagi Istri yang Ditalak Ba’in Sugra”.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Atas terselesaikannya penyusunan tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas segala doa, dukungan, inspirasi dan aspirasi serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi dan Dr. Faturahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Ali Sodikin M.A., selaku Pembimbing II Tesis bagi penulis, yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar, dan teliti serta memberi banyak masukan dalam menyusun tesis ini. Atas setiap ilmu yang dibagikan dalam setiap mata kuliah yang diampu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih.

5. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang sangat kompeten menjalankan perannya sebagai akademisi dalam memberikan ilmu pengetahuannya kepada mahasiswa dan masyarakat yang terkait.
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah bersedia membantu memenuhi akademik penulis selama kuliah di Magister Hukum Islam sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
8. Ibunda penulis, Faridah yang senantiasa selalu mendoakan, mendidik, memotivasi dan memberikan dukungan terhadap penulis selama menyelesaikan studi.
9. Ayahanda penulis, Iskandar (almarhum) yang menjadi inspirasi terbesar dalam melanjutkan S2 ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
10. Kakak penulis, (Zulfikar, Maria Ulfa Suaminya,) dan Adik penulis (Siti Nurhaliza) yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tesis dan studi penulis.



11. Suami penulis, Muhammad Ridwansyah yang selalu memberikan dukungan, mendoakan, mendampingi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
12. Ibu dan Ayah mertua penulis, yang memberikan dukungan dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tesis dan studi penulis.
13. Keluarga Suami penulis, yang memberikan dukungan dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tesis dan studi penulis.
14. Keluarga, sahabat, saudara seperjuangan di Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga: Arina, Hanik, Imel, Ulfi, Ridho, Jazil, Hamdan, Lutfi, Muammar, Asrizal, Yuda, Rossi, Yasin, Iwan, Bkti, Kak Tiar, dan Kemas, yang telah mendukung penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk penulisan karya ilmiah lainnya yang lebih baik lagi. Penulis mengucapkan permohonan maaf setulus-tulusnya apabila ada kekhilafan dan kesalahan dalam tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum.

Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dan menunjukkan jalan benar bagi para pencari ilmu dan keridhaan-Nya.

Yogyakarta, 15 Mei 2017  
Penulis,

Zakyyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PRODI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritis .....	10
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	13
2. Pendekatan.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data .....	13
4. Teknik Analisis Data .....	14
5. Pedoman Penyusunan Tesis .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II TEORI PERTINGKATAN NORMA .....**

A. Nilai-Nilai Dasar .....	23
B. Asas Umum Hukum Islam .....	25
1. Kaidah-Kaidah Hukum Islam.....	25
2. Asas-Asas Hukum Islam .....	28
C. Ketentuan-Ketentuan Hukum Konkret.....	31
D. Manfaat Teori Peningkatan Norma.....	33

### **BAB III KONSEP NAFKAH, MASKAN, DAN KISWAH MENURUT KHI DAN PENDAPAT EMPAT MAZHAB**

#### **A. Talak**

1. Dasar Hukum Talak.....	35
2. Pembagian Talak .....	38
B. Konsep Dasar Nafkah, <i>Maskan</i> , dan <i>Kiswah</i> .....	41
C. Nafkah, Maskan, dan Kiswah Istri yang Ditalak Perspektif KHI .	44
D. Nafkah, Maskan, dan Kiswah Istri yang Ditalak Perspektif Empat Mazhab	
1. Mazhab Hanafi .....	47
2. Mazhab Maliki.....	49
3. Mazhab Syafi'i .....	51
4. Mazhab Hambali .....	53

### **BAB IV ANALISIS STATUS NAFKAH, MASKAN, DAN KISWAH BAGI ISTRI YANG DITALAK B 'IN SUGRA**

A. Nafkah, <i>Maskan</i> , dan <i>Kiswah</i> bagi Istri yang Ditalak <i>B 'in</i> <i>Sugra</i> Perspektif KHI dan Empat Mazhab	
1. Perspektif KHI.....	56
2. Perspektif Empat Mazhab.....	62
B. Nafkah, Maskan, dan Kiswah bagi Istri yang Ditalak <i>B 'in</i> <i>Sugra</i> Analisis Teori Peningkatan Norma .....	68

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 78**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan di samping sebab lain yaitu kematian, *fasakh*, *li'an*, *nusyaz* dan *syiqaq*.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam<sup>2</sup> disebutkan, perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas putusan Pengadilan. Selajutnya pada Pasal 114 KHI dijelaskan lebih lanjut, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dapat disimpulkan bahwa talak merupakan sebab dari putusnya perkawinan. Namun di sisi lain, talak juga merupakan bentuk dari putusnya perkawinan karena walaupun putusnya perkawinan berdasarkan gugatan perceraian, hakim akan tetap menyatakan istri ditalak *b'in sugra*.

Talak merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara bekas suami dan bekas istri. Menurut Hans Kelsen, suatu hak hukum mempresuposisikan kewajiban hukum orang lain.<sup>3</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa hak istri merupakan

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 69.

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya akan disingkat KHI) disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan konsensus (ijmak) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Lebih lanjut akan dijelaskan pada bab tiga. Cik Hasan Bisri, "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", dalam *Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 8.

<sup>3</sup>Miftakhul Huda, Nur Rosihin Ana, (ed), *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 61.

kewajiban suami dan hak suami merupakan kewajiban istri. Salah satu hak dan kewajiban suami dan istri pasca terjadinya talak adalah sebagai berikut:

Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan,

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam ‘*iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *b ’in* atau *nusy z* dan dalam keadaan tidak hamil.

Pasal di atas membebankan kewajiban suami hanya kepada bekas istri yang tidak *nusy z* dan tidak dijatuhi talak *b ’in*. Artinya, secara otomatis jika istri menggugat cerai kepada suami, maka suami tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* jika terjadi perceraian karena istri yang menggugat cerai akan dijatuhi talak *b ’in sugra*.

Namun pada Pasal 152 KHI yang berbunyi “Bekas Isteri berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusy z*” hanya bekas istri yang *nusy z* yang dinyatakan tidak berhak atas nafkah ‘*iddah* sedangkan bekas istri yang dijatuhi talak *b ’in* tidak disebutkan dan hak yang diperoleh hanya sebatas nafkah ‘*iddah* tidak disertai dengan *maskan* dan *kiswah*. Dari gambaran di atas terlihat seolah KHI tidak konsisten dalam mengatur apa yang menjadi hak bagi istri yang ditalak *b ’in sugra*.

Selain dalam KHI, disparitas aturan juga terjadi pada pendapat mazhab yang dalam hal ini hanya akan dibahas pendapat empat mazhab populer yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hambali. Keempat mazhab sepakat apabila terjadi talak *raj‘i*, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama ‘*iddah*. Namun apabila terjadi talak *b ’in*, ulama mazhab berbeda pendapat. Mazhab Hanafi berpendapat bekas istri memiliki hak

atas nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa *'iddah* sama seperti hak istri yang dijatuhi talak *raj'i*. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bekas istri hanya berhak atas *maskan* saja, dan menurut mazhab Hambali, bekas istri tersebut tidak memiliki hak apapun.<sup>4</sup>

Ketentuan yang beragam tersebut berakibat kepada disparitas putusan hakim di Pengadilan Agama, karena KHI dan pendapat ulama mazhab merupakan pegangan atau panduan bagi hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, ada hakim dalam beberapa kasus memutuskan bekas suami diwajibkan untuk membayar nafkah *'iddah* kepada bekas istri yang dijatuhi talak satu *b 'in sugra* dan yang menjadi salah satu pertimbangan adalah Pasal 149 KHI dan pendapat mazhab Hanafi.<sup>5</sup> Namun masih banyak hakim yang tidak sependapat, hal ini dapat dilihat dari putusan hakim tersebut yang tidak membebaskan nafkah *'iddah* kepada bekas suami walaupun telah diminta oleh bekas istri yang dijatuhi talak satu *b 'in sugra* dengan berargumen kepada Pasal 149 KHI.<sup>6</sup>

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dan praktik terkait hak bekas istri yang dijatuhi talak *b 'in sugra* masih belum jelas, karena baik dalam KHI maupun empat mazhab hanya menyebut talak *b 'in* tanpa mengklasifikasikan jenis talak *b 'in sugra* atau *kubra* dan dengan ketentuan yang

---

<sup>4</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al Fikr, 1989) VII: 657-659.

<sup>5</sup>M. Ulil Azmi, "Pemberian Nafkah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS)," *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015), Faris Ahmad Jundhi "Pemberian Nafkah *'iddah* pada Cerai Gugat (*Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt*)", dan masih ada beberapa penelitian lagi.

<sup>6</sup>Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 427/Pdt.G/2010/PA.Bgr, Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 0550/Pdt.G/2016/PA.Amb, dan masih banyak putusan lainnya.

berbeda-beda. Ditambah lagi dengan beragam pendapat ulama mazhab yang akhirnya timbul kesimpulan bahwa belum ada kepastian hukum terhadap apa yang menjadi hak bagi bekas istri yang dijatuhi talak *b 'in sugra*. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini fokus untuk mendeskripsikan serta menganalisis ketentuan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra* dalam KHI dan pendapat empat mazhab serta menemukan argumen yang kuat dan menggambarkan status nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra* yang dianalisis melalui teori pertingkatan norma dalam hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menegaskan dan memfokuskan permasalahan yang dikaji dan ditemukan jawabannya, maka dirumuskan dua masalah dalam bentuk pertanyaan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang talak *b 'in sugra* dalam KHI dan pendapat empat mazhab?
2. Bagaimana status nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra* ditinjau menurut teori pertingkatan norma dalam hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan kepastian terhadap hak nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra*, namun secara khusus ada dua tujuan yang dicapai:



1. Mendeskripsikan serta menganalisis ketentuan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra* dalam KHI dan pendapat empat mazhab.
2. Mengevaluasi ketentuan mana yang paling kuat terakut status nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra* dengan memanfaatkan teori pertingkatan norma.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dapat berguna baik secara teoretis maupun secara praktik. Secara teoretis kegunaannya sebagai sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Sedangkan secara praktik, kegunaannya sebagai tambahan referensi bagi praktisi hukum Islam khususnya di bidang hukum keluarga dalam memutuskan atau mensosialisasikan hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian, serta sebagai referensi bagi para pasangan suami istri yang bercerai atau ingin bercerai dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing pasca bercerai, khususnya terkait hak istri dan kewajiban suami memenuhi nafkah, *maskan*, dan *kiswah*.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu. Setelah ditelusuri dari beberapa sumber, ditemukan ada empat penelitian yang objek penelitiannya sama dengan penelitian ini yaitu berbicara tentang nafkah istri pasca perceraian. Walaupun objek kajiannya sama, namun dari keempat penelitian ini memiliki perbedaan mendasar yang akan diuraikan sebagai berikut.

Penelitian pertama dari Wahyu Setiawan<sup>7</sup> yang melakukan penelitian dengan judul “Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian”. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok yaitu; 1). Bagaimana hak perempuan pasca perceraian dalam perundang-undangan keluarga muslim di India dan Indonesia dalam bidang nafkah pasca perceraian dan apa sajakah persamaan dan perbedaan konsep yang ditetapkan kedua negara?, 2). Metode penemuan hukum apa yang digunakan dalam proses pembentukan hukum dan keberanjakannya dari konsep fikih tradisional sampai membentuk undang-undang hukum keluarga kontemporer dan bagaimana relevansinya terhadap pengembangan hak-hak perempuan pasca perceraian yang lebih humanis?

Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah terjadi keberanjakan hukum terkait hak-hak perempuan pasca perceraian di India dan Indonesia dalam beberapa aspek, yaitu meliputi definisi nafkah, bentuk putusnya perkawinan yang menimbulkan hak nafkah, keadaan yang mempengaruhi hak nafkah, ketentuan bagi suami yang lalai, dan orientasi kesejahteraan sosial ekonomi istri pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analitik-komperatif dengan pendekatan normatif-yuridis.

Berdasarkan dekskripsi dari rumusan masalah serta hasil penelitian terlihat bahwa penelitian tersebut bersifat komparasi antara dua negaar dengan objek komparasinya adalah nafkah pasca percearaian, serta mendeskripsikan perbedaan atau pembaharuan yang terjadi seputar isu nafkah dari fikih klasik hingga berbentuk perundang-undangan di dua negara yaitu Indonesia dan India. Berbeda

---

<sup>7</sup>Wahyu Setiawan, “Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian (Studi atas Undang-undang perkawinan India dan Indonesia”, *Tesis* Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

dengan penelitian tersebut, penelitian ini berbicara nafkah pasca perceraian dalam bentuk lebih khusus yaitu bagi istri yang ditalak *b 'in sugra*, dan lebih umum karena langsung melihat sumber dasar dari ketentuan hukumnya tanpa dibatasi ruang lingkup negara.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Ulil Azmi<sup>8</sup> dengan sumber data primernya putusan No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS. Adapun rumusan masalahnya adalah mengapa dalam putusan tersebut nafkah *'iddah* dibebankan pada cerai gugat?, apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dan atas dasar teori apa hakim memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada Penggugat?. Untuk mendapatkan jawaban dari penelitian tersebut, Azmi melakukan penelitian pustaka dengan cara menganalisa data-data dokumen yakni putusan serta buku-buku yang berkaitan dan memperkuatnya dengan melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah; 1) Hakim membebaskan nafkah *'iddah* pada cerai gugat karena berpegang kerana berpegang kepada pendapat Imam Hanafi, 2) Adapun pertimbangan hakim antara lain Putusan Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007, Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 KHI, dan 3) Hakim mendasarkan putusannya pada teori keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, maka hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan ijtihad yang dilakukannya. Penelitian ini ditulis dalam bentuk skripsi yang diberi judul “Pemberian Nafkah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS)”.

---

<sup>8</sup>M. Ulil Azmi, “Pemberian Nafkah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS),” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).

Penelitian yang dilakukan Azmi merupakan upaya mendeskripsikan alasan hakim memberikan nafkah kepada istri yang menggugat cerai (artinya istri didijatuhi talak satu *b 'in sugra*) yaitu atas dasar mengikut pendapat mazhab Hanafi dan dengan mempertimbangkan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Sedangkan penelitian ini dapat dikatakan meneliti lebih lanjut terkait pertimbangan tersebut dengan kajian di luar putusan hakim serta mendeskripsikan dan menganalisis lebih jelas bagaimana ketentuan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* dalam KHI dan pendapat empat mazhab.

Serupa dengan kajian yang dilakukan Azmi, namun dengan putusan yang berbeda, Faris Ahmad Jundhi<sup>9</sup> juga melakukan penelitian dengan judul “Pemberian Nafkah Iddah pada Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt)”. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut; 1) Bagaimana hak nafkah *'iddah* istri setelah mengajukan cerai gugat kepada suaminya menurut fikih?, 2) Bagaimana hak nafkah *'iddah* istri setelah mengajukan cerai gugat kepada suaminya menurut hukum yang berlaku di Indonesia?, dan 3) Apakah pertimbangan hakim memperbolehkan istri sebagai penggugat mendapatkan hak nafkah *'iddah* dari suami setelah cerai gugat?.

Adapun metode penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan di atas dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan melakukan observasi dan wawancara serta melakukan kajian dokumen untuk menguatkan dan menyempurnakan hasil temuan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah; 1) Hakim membebankan nafkah *'iddah* pada cerai gugat karena berpegang

---

<sup>9</sup>Faris Ahmad Jundhi, “Pemberian Nafkah *'iddah* pada Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt),” *skripsi* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, (2013).

karena berpegang kepada pendapat Imam Hanafi, 2) Nafkah *'iddah* istri di atur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007, Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 KHI, dan 3) Adapun pertimbangan hakim antara lain Putusan Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007, Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 KHI, selain itu hakim juga memberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* kepada bekas istri dengan memperhatikan 5 (lima) dasar pertimbangan yaitu: adanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak, adanya ketertiban hukum, menempatkan harkat perempuan pada proporsinya, adanya kemampuan bekas suami untuk memberikan nafkah *'iddah* dan hadiah kepada bekas istri, dan adanya kelayakan bekas istri untuk menerima nafkah *'iddah* dan hadiah dari bekas suami.

Penelitian di atas mendeskripsikan ketentuan pemberian nafkah *'iddah* bagi istri yang menggugat cerai dari beberapa segi hukum, yaitu dari sudut pandang fikih klasik namun hanya terbatas pada mazhab Hanafi saja, hukum yang berlaku di Indonesia sertapertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Berbeda dengan penelitian ini yang mendeskripsikan serta menganalisis ketentuan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* dalam KHI dan fikih klasik yang meliputi empat mazhab.

Adapun yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fuzan<sup>10</sup> dengan judul “Maqasid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan”. Penelitian tersebut mengkritisi aturan yang selama ini berlaku terkait nafkah *'iddah* bagi istri yang ditalak *b'in* yaitu pendapat ulama klasik, Pasal 149 huruf b KHI dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>10</sup>Muhammad Fauzan, “Maqasid Nafkah *'iddah* dan Perlindungan Perempuan”, dalam <http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel-badilag>, diakses pada Senin, 09 Januari 2017.

Perkawinan. Adapun kesimpulan yang diberikan adalah aturan yang selama ini digunakan untuk memutuskan nafkah istri yang ditalak *b 'in* sudah tidak relevan dan jauh dari nilai keadilan, sehingga untuk mewujudkan nilai keadilan serta perlindungan bagi perempuan, istri yang ditalak *b 'in* berhak untuk mendapatkan nafkah *'iddah*. Berbeda dengan penelitian Muhammad Fauzan, penelitian ini menganalisis ketentuan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra* dalam KHI dan pendapat empat mazhab serta mengevaluasi ketentuan mana yang paling kuat.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Setelah mendapat deskripsi ketentuan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra* dalam KHI dan pendapat empat mazhab, kemudian nafkah, *maskan*, dan *kiswah* tersebut dianalisis dengan teori pertingkatan norma dalam hukum Islam. Teori pertingkatan norma dipopulerkan oleh Syamsul Anwar sebagai upaya keberlanjutan dari penelitian atau rumusan yang telah dilakukan oleh pakar hukum Islam terdahulu.

Secara etimologi, norma memiliki dua arti. Pertama, norma dapat diartikan sebagai peraturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat, dan kedua, norma juga dapat diartikan sebagai aturan yang baku atau ukuran untuk menentukan sesuatu.<sup>11</sup> Norma terbagi lima, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah norma hukum. Norma hukum

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1078.

adalah petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Sanksi dari norma hukum bersifat mengikat dan memaksa.<sup>12</sup>

Norma hukum oleh para ahli hukum Islam klasik dibagi menjadi dua tingkat yaitu asas-asas umum (*al-usul al-kuliyyah*) dan peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahk m al-far'iyah*), namun pakar hukum Islam berikutnya melakukan perkembangan dengan membagi norma hukum menjadi kepada tiga bagian, dan Syamsul Anwar cenderung mengikuti langkah perkembangan tersebut dengan membagi norma hukum Islam kepada tiga tingkat yaitu 1) norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-qiyam al-as siyyah*), yaitu norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam seperti kemaslahatan, keadilan dan sebagainya, 2) norma-norma tengah yang terletak antara dan sekaligus menjembatani nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum konkret. Norma tengah ini dalam ilmu hukum Islam merupakan doktrin-doktrin umum hukum Islam, dan secara spesifik dibagi kepada dua jenis yaitu asas-asas hukum Islam (*an-nazariyyat al-fiqhiyyah*) dan kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qaw 'id al-fiqhiyyah*), dan 3) peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahk m al-far'iyah*), yaitu ketentuan-ketentuan *syar'i* mengenai berbagai kasus hukum.<sup>13</sup>

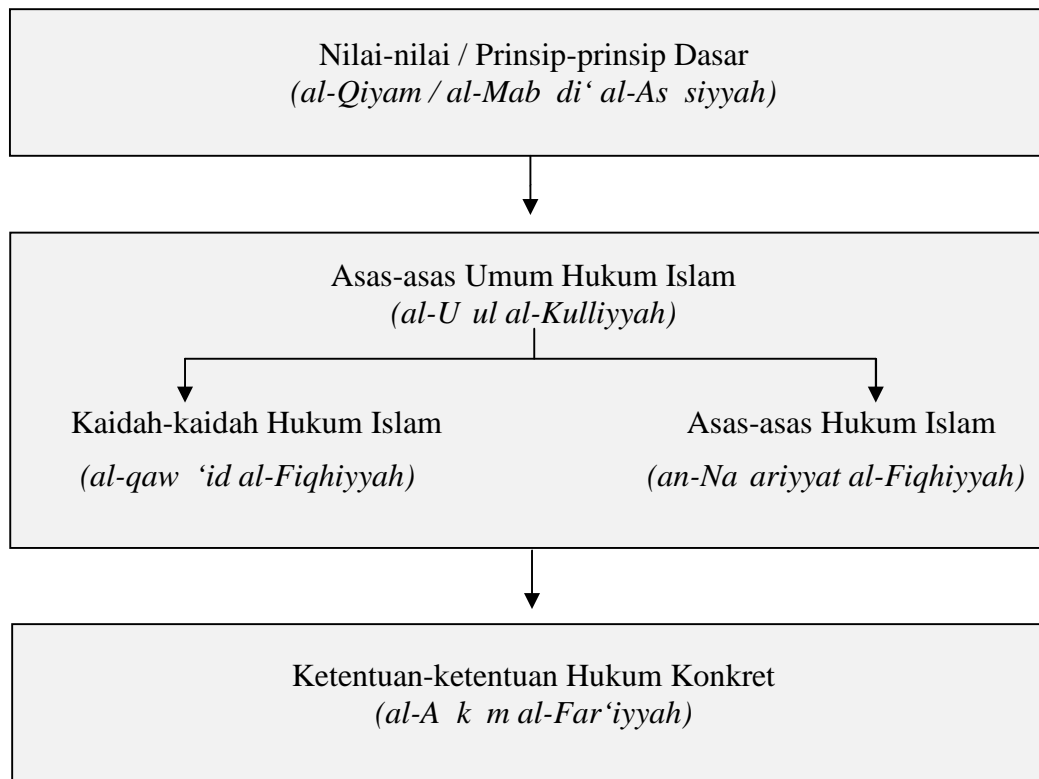
Syamsul Anwar menamakan perjenjangan norma tersebut dengan meminjam istilah Hans Kelsen yaitu teori pertingkatan norma dalam hukum Islam. Teori pertingkatan norma dalam hukum Islam dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

<sup>12</sup>[www.organisasi.org](http://www.organisasi.org), diakses tanggal 13 Mei 2017.

<sup>13</sup>Syamsul Anwar, 'Metodologi Hukum Islam' Diktat Matakuliah Ushul Fikih Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 49. Lihat juga Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), hlm. 12.



### Skema Teori Peningkatan Norma dalam Hukum Islam



Teori peningkatan norma dapat dijadikan sebagai upaya menentukan hukum dari permasalahan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra*. Penemuan hukum tidak hanya terbatas pada metodologi yang terdapat dalam usul fikih, namun penemuan hukum juga dapat dilakukan melalui penyimpulan kaidah-kaidah dari ketentuan hukum konkret yang kemudian mencari asas dan nilai yang memayungi kaidah tersebut, sehingga dapat disimpulkan hukum dari suatu permasalahan, dan penemuan hukum dengan jalur ini dapat disebut teori peningkatan norma. Penjelasan lebih lanjut terkait teori ini dan bagaimana cara mengoperasikannya akan dijelaskan pada bab dua.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*),<sup>14</sup> karena sumber data yang digunakan adalah KHI, kemudian buku yang memuat pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang berkaitan dengan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* sebagai akibat hukum dari talak dan ini merupakan sumber data primer. Untuk memahami serta memberikan penjelasan lebih lengkap, maka dibantu data sekunder berupa karya tulis baik berupa buku, laporan, maupun artikel yang memuat teori pertingkatan norma, perbandingan mazhab, buku usul fikih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Arab Indonesia.

### 2. Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra* dalam KHI dan empat mazhab kemudian untuk menentukan mana ketentuan yang paling kuat argumennya, status nafkah, *maskan*, dan *kiswah* tersebut akan dianalisis dengan teori pertingkatan norma dalam hukum Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi.<sup>15</sup> Data dikumpulkan dengan mencari referensi atau buku-buku dan

---

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

<sup>15</sup>Studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 21.

laporan hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian yaitu terkait konsep nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra*.

#### 4. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik<sup>16</sup> dengan logika berfikir deduktif<sup>17</sup>. Data yang telah dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan memberikan penafsiran serta analisis terhadap data tersebut. Analisis yang ditambahkan bermanfaat untuk mengkritisi data yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra*.

#### 5. Pedoman Penyusun Tesis

Teknik penyusunan hasil penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan tesis Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016.

### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berkonsentrasi pada pembahasan akibat hukum dari talak yang dibatasi pada nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra*. pada bagian awal dipaparkan terkait latar belakang dari penelitian ini yang kemudian diperjelas dengan rumuasan yang akan dikaji serta tujuan dan manfaat yang ingin

---

<sup>16</sup>Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 336.

<sup>17</sup>Logika berpikir deduktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari kasus-kasus atau peraturan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus/individual. Logika berpikir deduktif biasanya menggunakan pola penalaran silogisme yang terdiri dari premis mayor, premis minor dan kesimpulan. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 35.

dicapai. Metode penelitian yang dilakukan juga dijelaskan pada bagian pendahuluan ini.

Kemudian untuk memperjelas teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori pertingkatan norma dalam hukum Islam dideskripsikan pada bab dua, agar terstruktur dengan jelas landasan dari teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini. Pada bagian bab berikutnya yaitu bab tiga disajikan data yang merupakan bahan kajian lebih lanjut yang meliputi konsep talak dan pembagiannya, konsep dasar nafkah, dan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak menurut KHI dan empat mazhab.

Setelah disajikan teori pada bab dua dan data pada bab tiga, pada bab empat disajikan analisis teori yang telah disebutkan terhadap data atau permasalahan dari penelitian ini sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian yang diperoleh pada bab lima.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam pembahasan serta analisis stratus nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra* adalah:

1. Pasal 149 huruf b KHI menentukan bahwa istri yang ditalak *b 'in sugra* tidak berhak mendapatkan nafkah, *maskan*, dan *kiswah*, namun pada Pasal 152 KHI menentukan bahwa istri yang ditalak *b 'in sugra* berhak atas nafkah saja dengan syarat tidak *nusy z*. Sedangkan pendapat empat mazhab terbagi menjadi tiga ketentuan: ketentuan pertama istri yang ditalak *b 'in sugra* berhak atas nafkah, *maskan*, dan *kiswah* dengan syarat tidak *nusy z*, ini merupakan pendapat mazhab Hanafi. Ketentuan kedua adalah istri yang ditalak *b 'in sugra* hanya berhak atas *maskan* dengan syarat tidak *nusy z*, ini merupakan pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Terakhir ketentuan ketiga merupakan pendapat mazhab Hambali yang menentukan bahwa istri yang ditalak *b 'in sugra* tidak memiliki hak atas nafkah, *maskan*, dan *kiswah*.
2. Istri yang ditalak *b 'in sugra* berhak mendapatkan nafkah, *maskan*, *kiswah* selama *'iddah* sesuai kemampuan ekonomi suami dengan syarat tidak *nusy z*.

## B. Saran

Setelah mempelajari dan menganalisis status nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi istri yang ditalak *b 'in sugra*, terlihat bahwa KHI walaupun dikatakan sebagai wujud pembaharuan hukum Islam di Indonesia namun masih perlu disempurnakan lagi, sehingga dapat lebih memperhatikan hak dan kewajiban bagi suami istri yang bercerai. Sebagaimana problematika yang ditemukan sekarang, angka gugat cerai lebih tinggi dibandingkan angka cerai talak dan secara keseluruhan angka perceraian semakin tinggi tiap tahunnya, maka sudah seharusnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk menertibkan permasalahan tersebut dan salah satunya dengan memperhatikan hak dan kewajiban pasca perceraian agar tidak timbul kemudharatan yang seharusnya perceraian itu menjadi kunci hilangnya kemudharatan dalam perkawinan.

Adapun saran kepada peminat studi usul fikih, teori pertingkatan norma merupakan langkah awal yang sangat positif sama seperti KHI yang merupakan langkah awal dari pembaharuan hukum Islam, namun langkah awal ini masih sangat rentan, karena masih banyak hal yang harus lengkapi. Perkembangan muamalah di bidang ekonomi cukup pesat sehingga para pakar hukum Islam sangat gesit mengumpulkan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan perkembangan tersebut, sehingga bidang hukum lain terkhusus hukum keluarga menjadi sedikit terabaikan, kaidah fikih di bidang hukum keluarga harus kembali dikembangkan karena, walaupun masif hukum keluarga juga mengalami perkembangan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Hadis

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terj. Asep M, Abdullah Jinan, Jakarta: Gramedia, 2012.

Ad-Dar Qutni, 'Ali ibn 'Umar, *Sunan ad-Dar Qutni*, Beirut: Dar al-Fikr 1994.

Muhammad bin Hibban, *Shahih ibnu Hibban*, Beirut: Mu'assasah al-Rasalah, 1993.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-'Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, edisi. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.

Al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Nail al-Authâr min Ahâdîts Said al-Akhhbâr Syarh Muntaqa al-Akhhbâr*, ttp: Idarah al-Thaba'ah al-Minbarah, t.t.

### B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.

Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, edisi ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.



- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Anwar, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam Diktat Matakuliah Ushul Fikih Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- \_\_\_\_\_, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, dalam Amin Abdullah dkk, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- \_\_\_\_\_, “Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, Juni 2016.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pemikiran Usul Fikih al-Gazzali (450-505/1058-1111)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asad, Muhammad, *The Message of The Qur’an*, Gibraltar: t.p., 1980.
- Asshiddiqie, Jimly, M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alasan Syar’i tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam*, ttp.: t.p., 1999.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- El Alami, Dawoud, Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, ttp.: CIMEL and Kluwer Law International, 1996.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Huda, Miftakhul, Nur Rosihin Ana, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Humam, Ibnu, *Syarah Fath al-Qad r*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Imam Malik bin Anas, *al-Muwa a'*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanikus, 2006.
- Al-Ja , *Ahk m al-Qur'an*, Beirut: Dar Ihya' al-Tur ts al-Arabi, 1992.
- Al-Jaziri, 'Abdu ar-Rahman, *Kit b al-Fiqh 'ala al-Maz hib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-K t b al-'Ilmiyah, 2002.
- Al-K s n , 'Al u ad-Din Abi Bakar ibn Mas'ud, *Bad 'i' a - an 'i' fi Tartib asy-Syara'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el-Muttaqin Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khusni, Muhammad bin ri , *u l al-Futy fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam M lik*, ttp.: ad-Dar al-'arabiyyah lilkitab, 1985.
- Koto, Alaididin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Malik bin Anas, *al-Muwa a'*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- Muhammad, Ali Jumu'ah, *Tarikh U ul al-Fiqh*, Qahirah: Dar al-Maqtum Linnasyri wa at-Tauzi', 2014.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mukhtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muwaffaq ad-Din Abu Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughni wa asy-Syarah al-Kab r*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawaa'id al Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasyatuha, Ta awwuruha, Darasah Muallafaatiha Adillatuha, Muhimmatuha, Ta biq tiha*, Beirut: Dar al-Qalam, 2000.

- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzafa, 2004.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Qahirah: al-Fath li I'lam al-Arabi, t.t.
- Sarakhsi, Syams ad-Din, *Al-Mabsu*, Beirut: Dar-al-Ma'rifah, 1989.
- Ash-Shiddieqy, M. Tengku Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Songo 12, Laskar Lawang, *Term Syari'at dan Cita Kemashlahatan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Teori Kemashlahatan Hukum Islam*, Kediri: Lirboyo Press, 2012.
- As-Suyu i, Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, *al-Asyby h wa an-Na 'ir fi al-Fur '*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Suyuthi, Jalaluddin, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Asy-Syafe'i, Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Asy-Syafi'i, Imam Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*, ttt: Dar al-Wafa', 2008.
- Asy-Syahin, Muhammad Abdussalam, *Hasyiyah Syeikh Ibrahim al-Baijuri 'ala matan Syeikh Abi Syuja'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Syaltout, Syaikh Mahmud Syaikh M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih*, terj. Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kuliyah al-Khamsah*, Malang: uin-maliki Press, 2010.

Al-'U m n, Abi 'Abdillah Muhammad bin 'Ali bin z , *al-Kuliyat al-Fiqhiyyah*, ttp.: t.p., t.t.

Washil, Nashr Farid Muhammad, Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed.), *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: al-Hidayah, 1968.

Yusdani, Mir Mu'allim, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Az-Zahrah, Muhammad Abu, *U ul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, ttp.:Dar al-Fikr, 1985.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

### **D. Jurnal, Tesis dan Skripsi**

Amrulloh, "Ke- a i -an dan ke- a 'if-an hadis 'Perkara Halal yang Paling Dibenci Allah Adalah Talak' dalam Implikasinya terhadap Konsep Talak", *MARĀJI': Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 1, September 2015.

Azmi, M. Ulil, "Pemberian Nafkah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS)," *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

Jamil, M. Nafkah Keluarga dan Perubahan Sosial, *Tesis* Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Jundhi, Faris Ahmad , "Pemberian Nafkah Iddah pada Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt)," *skripsi* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, (2013).

Setiawan, Wahyu, Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian (Studi atas Undang-undang perkawinan India dan Indonesia, *Tesis* Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

#### **E. Ensiklopedi, Kamus dan Website**

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002.

Ma'uf, Louis, *Al-Munjid fi Lughah wa al-'a'lam*, ed. 37, Beirut: Dar al-Masyruk, 1986.

Manz r, Ibnu, *Lis n al-'Arabi*, Beirut: Dar al-Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1992.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

\_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

<http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel-badilag>.

[www.organisasi.org](http://www.organisasi.org).

## Lampiran I : TERJEMAHAN

NO	Hal	Q. S.	Terjemahan
1	41	2: 230	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mengetahui.
2	47	65: 6	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
3	51	65: 1	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) <i>'iddahnya</i> (yang wajar) dan hitunglah waktu <i>'iddah</i> itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.

			<p>Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.</p>
4	71	2: 231	<p>Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir <i>'iddahnya</i>, Maka rujukilah mereka dengan cara yang <i>ma'ruf</i>, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang <i>ma'ruf</i> (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Qur'an dan hikmah (sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.</p>
5	73	65: 7	<p>Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.</p>

## Lampiran I : TERJEMAHAN

NO	Hal	Q. S.	Terjemahan
1	41	2: 230	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mengetahui.
2	47	65: 6	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
3	51	65: 1	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) <i>'iddahnya</i> (yang wajar) dan hitunglah waktu <i>'iddah</i> itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.



			<p>Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.</p>
4	71	2: 231	<p>Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir <i>'iddahnya</i>, Maka rujukilah mereka dengan cara yang <i>ma'ruf</i>, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang <i>ma'ruf</i> (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Qur'an dan hikmah (sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.</p>
5	73	65: 7	<p>Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.</p>

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Zakyyah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sigli, 14 Juni 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jln. Kotalintang Atas Gg. Jawa No. 223, Kota Kualasimpang,  
Aceh Tamiang  
Email : zh\_isika37@yahoo.com  
Ayah : Alm. Iskandar  
Ibu : Faridah  
Suami : Muhammad Ridwansyah, M.H.

### **B. Riwayat Pendidikan**

#### **1. Pendidikan Formal**

- |  |      |
|--|------|
| a. SD N 07 Kualasimpang, Aceh Tamiang          | 2004 |
| b. MTs. S. Al-Yusriyah Langkat, Sumatera Utara | 2007 |
| c. MAS Al-Yusriyah Langkat, Sumatera Utara     | 2010 |
| d. S1 UIN Ar-Raniry, Banda Aceh                | 2014 |
| e. S2 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta           | 2017 |

#### **2. Pendidikan Non Formal**

- |  |      |
|--|------|
| a. Kangguru International English Shcool (KIES) Banda Aceh | 2011 |
| b. Aceh Mandarin Camping (National Taitung University)     | 2012 |
| c. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) UIN ar-Raniry      | 2012 |
| d. Sekolah Gender, P2GHA UIN Sunan Kalijaga                | 2016 |

### **C. Pengalaman Organisasi**

1. Ketua Organisasi Siswa Pesantren Al-Yusriyah (OSPA)
2. Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga
3. Ketua KOHATI HMI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry
4. Bendahara Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN ar-Raniry

**D. Minat Keilmuan:** Hukum dan usul fikih

**E. Karya Ilmiah**

1. Nasab Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Analisis Teori *Hifzu an-Nasl*) (Skripsi).
2. Nasab Anak Luar Kawin Menurut “*Hifzhu Nasl*” Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Terbit di Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016, hal. 195-214).
3. Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah (dalam proses terbit di Jurnal Al-Ahwal).

Yogyakarta, 15 Mei 2017

(Zakyyah)